

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH KEPEMILIKAN YANG
DIDUDUKI SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN
HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR
5/Pdt.G/2019/PN Krs).**

Oleh

Ahmad Zainul Abidin.NIM.2014101025

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) bagaimana pengaturan terkait sengketa tanah kepemilikan yang di duduki secara melawan hukum menurut Hukum Perdata Indonesia, Serta (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Ptg.G/2019/PN Krs yang mengadili kasus sengketa terkait penyerobotan tanah di desa Temenggungan. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sifat deskriptif kualitatif. Jenis Pendekatan penelitian adalah melibatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, pendekatan kasus, perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terkait sengketa tanah kepemilikan yang diduduki secara melawan hukum Perdata Indonesia telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin, serta Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997. Dari akibat banyaknya peraturan tersebut sehingga penyelesaian sengketa kepemilikan yang di duduki secara melawan hukum menggunakan dasar hukum Pasal 160 HIR, pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 1925 KUHPerdata, Pasal 1361 KUHPerdata, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3909 K/Pdt/1994. (2) Dalam putusan hakim Nomor 5/Ptg.G/2019/PN Krs ialah menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah pekarangan seluas 1330M² sebagai mana dalam akta jual beli Nomor 210/JB/KREJENGAN/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007, yang dibuat oleh PUDJI ASTUTI, SH. PPAT di Kraksaan.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Melawan Hukum, Studi Putusan

**JURIDICAL REVIEW OF LAND OWNERSHIP DISPUTES
UNLAWFULLY OCCUPIED UNDER INDONESIAN CIVIL LAW
(STUDY DECISION NUMBER 5/Pdt.G/2019/PN Krs).**

By

Ahmad Zainul Abidin.NIM.2014101025

Legal Studies Program

ABSTRACK

This research aims to find out, (1) how the regulations regarding land ownership disputes that are occupied unlawfully according to Indonesian Civil Law are regulated, and (2) how the Judge considers them in Decision Number 5/Ptg.G/2019/PN Krs who adjudicates dispute cases related to land grabbing in Temenggungan village. The type of research used is normative juridical which has a qualitative descriptive nature. The type of research approach involves a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data collection technique used is document study, case approach, legislation. The results of the research show that (1) Regarding disputes over land ownership that is occupied unlawfully by Indonesian Civil Law, it has been regulated in Government Regulation No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and No. 51 of 1960 concerning the prohibition of using land without permission, as well as Government Regulation No. 24 of 1997. As a result of the many regulations, the resolution of ownership disputes that are illegally occupied uses the legal basis of Article 160 HIR, Article 1865 KUHPperdata, Article 1925 KUHPperdata, Article 1361 Civil Code, and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3909 K/Pdt/1994. (2) In the judge's decision Number 5/Ptg.G/2019/PN Krs, it is stated that the plaintiff is the legal owner of the 1330M² plot of land as stated in the sale and purchase deed Number 210/JB/KREJENGAN/VII/2007, dated 12 July 2007 , made by PUDJI ASTUTI, SH. PPAT in Kraksaan.

Keywords: *Land Dispute, Against the Law, Decision Study*